



AR SIP
BAGIAN HUKUM

BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
NOMOR 30 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
NOMOR 101 TAHUN 2016 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
 - b. bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Pertanian Nomor : 900/555/Distan Tanggal 11 Juli 2017 Perihal Usulan Penggunaan Sisa DAK Tahun 2016;
 - c. bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Ketahanan Pangan Nomor : 042.3/141/VII/2017 Tanggal 11 Juli 2017 Perihal Utang Pemda Tahun Anggaran 2016 yang bersumber dari DAK Bidang Pertanian Tahun Anggaran 2016;
 - d. bahwa berdasarkan Surat Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Nomor : 900/472/Balitbangda/VII/2017 Tanggal 11 Juli 2017 Perihal Usulan Perubahan Kode Rekening Kegiatan;
 - e. bahwa berdasarkan Surat Kepala Perikanan Nomor : 910/2706/Diskan Tanggal 26 Mei 2017 Perihal Permohonan Anggaran Parsial;
 - f. bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Nomor : 550/113/VII/KOMINFO Tanggal 05 Juli 2017 Perihal Permintaan Pengalihan Anggaran Tunjangan;
 - g. bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Pendidikan Nomor : 841/2151/Disdik Tanggal 12 Juli 2017 Perihal Pergeseran Anggaran;

- h. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g maka perlu menetapkan dengan Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan tentang Perubahan Keenam Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 101 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun Anggaran 2017;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3989);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4296);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4501);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah pertama dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 5 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 5);

AR SIP
BAGIAN HUKUM

27. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 10 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 10) ;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 3);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 4);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 11);
31. Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 101 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Tahun 2016 Nomor 101);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN NOMOR 101 TAHUN 2016 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 101 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2017 Nomor 101) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga sebenarnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 yang berubah terdiri dari :

A R S I P
BAGIAN HUKUM

NOMOR	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SELISIH
1	PENDAPATAN	1.364.298.218.102,73	1.364.298.218.102,73	0,00
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	206.430.560.695,22	206.430.560.695,22	0,00
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	75.456.757.472,53	75.456.757.472,53	0,00
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	7.087.117.361,00	7.087.117.361,00	0,00
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	10.550.000.000,00	10.550.000.000,00	0,00
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	113.336.685.861,69	113.336.685.861,69	0,00
1.2	DANA PERIMBANGAN	1.019.513.249.259,51	1.019.513.249.259,51	0,00
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	32.195.418.000,00	32.195.418.000,00	0,00
1.2.2	Dana Alokasi Umum	723.914.240.259,51	723.914.240.259,51	0,00
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	263.403.591.000,00	263.403.591.000,00	0,00
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	138.354.408.148,00	138.354.408.148,00	0,00
1.3.1	Pendapatan Hibah	18.298.898.299,00	18.298.898.299,00	0,00
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	46.534.825.049,00	46.534.825.049,00	0,00
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	63.379.672.000,00	63.379.672.000,00	0,00
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	10.141.012.800,00	10.141.012.800,00	0,00
2	BELANJA	1.403.334.820.118,73	1.403.819.471.018,73	484.650.900,00
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	686.891.012.092,65	692.090.012.092,65	5.199.000.000,00
2.1.1	Belanja Pegawai	551.873.134.992,65	551.873.134.992,65	0,00
2.1.4	Belanja Hibah	3.119.000.000,00	8.318.000.000,00	5.199.000.000,00
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	1.848.350.000,00	1.848.350.000,00	0,00
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	130.050.527.100,00	130.050.527.100,00	0,00
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	0,00	0,00	0,00
2.2	BELANJA LANGSUNG	716.443.808.026,08	711.729.458.926,08	-4.714.349.100,00
2.2.1	Belanja Pegawai	42.738.173.591,00	42.738.173.591,00	0,00
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	317.993.664.109,56	312.781.549.109,56	-5.212.115.000,00
2.2.3	Belanja Modal	355.711.970.325,52	356.209.736.225,52	497.765.900,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	-39.036.602.016,00	-39.521.252.916,00	-484.650.900,00
3	PEMBIAYAAN DAERAH			
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	44.036.602.016,00	44.521.252.916,00	484.650.900,00
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	39.036.602.016,00	39.521.252.916,00	484.650.900,00
3.1.6	Penerimaan Piutang Daerah	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	0,00

**ARSIP
BAGIAN HUKUM**

3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	0,00
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	39.036.602.016,00	39.521.252.916,00	484.650.900,00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0,00	0,00	0,00

2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran Peraturan Bupati ini dan merupakan bagian yang tidak terlepaskan dalam peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.



PARAF
SEKDA :
ASISTEN :
KABAN :
SEKRETARIS :
KABID :
KONSEPTOR :
PENGETIK :

Ditetapkan di Pangkajene

pada tanggal, 200 Juli 2017

BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,

SYAMSUDDIN A. HAMID

Diundangkan di Pangkajene
pada tanggal,

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

EFFENDI KASMIN
BERITA DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN TAHUN 2017
NOMOR

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

NOMOR : TAHUN 2017

TENTANG

: PERUBAHAN KEMAM PERATURAN BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
 NOMOR 101 TAHUN 2016 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
 DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017

A R S I P
BAGIAN HUKUM

PEMERINTAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

RINGKASAN PENJABARAN PERGESEKAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2017

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG
1	PENDAPATAN	1.364.298.218.102,73	1.364.298.218.102,73	0,00
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	206.430.560.695,22	206.430.560.695,22	0,00
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	75.456.757.472,53	75.456.757.472,53	0,00
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	7.087.117.361,00	7.087.117.361,00	0,00
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	10.550.000.000,00	10.550.000.000,00	0,00
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	113.336.685.861,69	113.336.685.861,69	0,00
1.2	DANA PERIMBANGAN	1.019.513.249.259,51	1.019.513.249.259,51	0,00
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	32.195.418.000,00	32.195.418.000,00	0,00
1.2.2	Dana Alokasi Umum	723.914.240.259,51	723.914.240.259,51	0,00
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	263.403.591.000,00	263.403.591.000,00	0,00
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	138.354.408.148,00	138.354.408.148,00	0,00
1.3.1	Pendapatan Hibah	18.298.898.299,00	18.298.898.299,00	0,00
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	46.534.825.049,00	46.534.825.049,00	0,00
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	63.379.672.000,00	63.379.672.000,00	0,00
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	10.141.012.800,00	10.141.012.800,00	0,00
2	BELANJA	1.403.334.820.118,73	1.403.819.471.018,73	484.650.900,00
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	686.891.012.092,65	692.090.012.092,65	5.199.000.000,00
2.1.1	Belanja Pegawai	551.873.134.992,65	551.873.134.992,65	0,00
2.1.4	Belanja Hibah	3.119.000.000,00	8.318.000.000,00	5.199.000.000,00
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	1.848.350.000,00	1.848.350.000,00	0,00
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/kabupaten/kota dan Pemerintahan Desa	130.050.527.100,00	130.050.527.100,00	0,00
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	0,00	0,00	0,00
2.2	BELANJA LANGSUNG	716.443.808.026,08	711.729.458.926,08	-4.714.349.100,00
2.2.1	Belanja Pegawai	42.738.173.591,00	42.738.173.591,00	0,00

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
 NOMOR : TAHUN 2017
 TENTANG : PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
 NOMOR 101 TAHUN 2016 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
 BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017

AR SIP
 BAGIAN HUKUM

Urusan Pemerintahan	: 4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang		
Bidang Pemerintahan	: 4.04	Keuangan		
Unit Organisasi	: 4.04.07	Badan Pengelola Keuangan Daerah		
Sub Unit Organisasi	: 4.04.07.02	Badan Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)		
KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG
6	PEMBAYARAN DAERAH			
6.1	PENERIMAAN PEMBAYARAN DAERAH	44.036.602.016,00	44.521.252.916,00	484.650.900,00
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	39.036.602.016,00	39.521.252.916,00	484.650.900,00
6.1.1.05	Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Dengan Akhir Tahun Belum Terselenggarakan	26.511.315.154,00	26.995.966.054,00	484.650.900,00
6.1.1.05.05	Uang Kepada Pihak Ketiga			
	Dinas Pemuda dan Olahraga (DAU)	69.835.365,00	69.835.365,00	-
	DAK Perikanan 2016	9.897.600,00	9.897.600,00	-
	Dinas Pendidikan (DAU)	2.047.944.150,00	2.047.944.150,00	-
	DAK Pendidikan 2016	1.409.746.650,00	1.409.746.650,00	-
	DAK Pendidikan 2015	427.071.858,00	427.071.858,00	-
	Dinas penataan ruang (DAK PP)	216.545.000,00	216.545.000,00	-
	DAK Air Minum 2015	16.622.726,00	16.622.726,00	-
	Dinas penataan ruang (DAU)	257.947.274,00	257.947.274,00	-
	Dinas Pariwisata (DAU)	248.192.500,00	248.192.500,00	-
	DAK Transportasi 2016	42.500.000,00	42.500.000,00	-
	Dinas perhubungan (DAU)	39.600.000,00	39.600.000,00	-
	Dinas Kesehatan (DAK Tambahan)	-	-	-
	DAK Pelayanan Kedarmasan	354.774.831,00	354.774.831,00	-
	Kesehatan (DAK Tambahan)	6.931.438.000,00	6.931.438.000,00	-
	DAK Pelayanan Rujukan	14.436.839.800,00	14.436.839.800,00	-
	Dinas Sosial (DAU)	2.359.400,00	2.359.400,00	-
	Dinas pertanian (DAU)	-	484.650.900,00	484.650.900,00
6.1.1.07	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	12.525.286.862,00	12.525.286.862,00	-
6.1.1.07.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			
	Silpa	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	-
	Silpa dana Akreditasi	48.797.493,00	48.797.493,00	-
	Silpa dana Jampersel	673.757.140,00	673.757.140,00	-

ARSIP

**BAHAGIAN HUKUM
SETIAWAJIB
BERKURANG/
BERKURANG**

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	PERUBAHAN	BERKURANG/ BERKURANG
	Silpa dana BOK	1.398.603.600,00	1.398.603.600,00	-
	Suapras puskesmas / puskesmas pembantu	41.394.629,00	41.394.629,00	-
	Silpa dana Bencana	362.734.000,00	362.734.000,00	-
6.1.6	Penerimaan Piutang Daerah	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	-
6.1.6.01	Penerimaan Piutang Daerah Dari Pendapatan Daerah	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	-
6.1.6.01.01	Penerimaan Piutang Daerah Dari Pendapatan Pajak Daerah	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	-
	Putang	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	-

Disetujui Oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan

- Catatan
- 1. Usulan Surat : Badan Pengelola Keuangan Daerah
 - 2. Sumber Dana : -
 - 3. Bentuk Persetujuan : -
 - 4. Tingkat Persetujuan : Penyampaian ke DPRD
 - 5. Catatan Lainnya : -



PARAF
SEKDA
ASISTEN
KABAN
SEKRETARIS
KABID
KONSEPTOR
PENGETIK

BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,

SYAMSUDDIN A. HAMID

ARSIP
BAKORAN HUKUM
 KEMENTERIAN KEHUTANAN
 DAN BELAKA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017

Uraian Perencanaan : 2
 Bidang Pemerintahan : 2.10
 Unit Organisasi : 2.10.01
 Sub Unit Organisasi : 2.10.01.01

Uraian Wajib Belanja Revisi dan Dapur
 Komunikasi dan Informatika
 Dinas Komunikasi dan Informatika
 Dinas Komunikasi dan Informatika

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			SELISIH
		VOLUME	SATUAN	HARGA	VOLUME	SATUAN	HARGA	
5	BELAKA							
5.1	BELAKA TIDAK LANGSUNG							
5.1.1	Belanja Pegawai							
5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan							
5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi							
5.1.1.01.02	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi							
5.1.1.01.03	Tunjangan Keluarga							
5.1.1.01.04	Tunjangan Ahhahan							
5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional							
5.1.1.01.06	Tunjangan Fungsional							
5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus							
5.1.1.01.08	Pembinaan Gaji							
5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS							
5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja							
	- Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja							
	- Tunjangan Kerja							
		1	tahun	30.625.000,00	1	tahun	30.625.000,00	
		1	tahun	315.324.698,11	1	tahun	315.324.698,11	

Diserai dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan

Catatan
 1. Usulan Surat : Dinas Komunikasi dan Informatika
 2. Sumber Dana :
 3. Bentuk Pengeluaran :
 4. Tingkat Persetujuan : Penyempurnaan ke DPRD
 5. Catatan Lainnya :



PARAF :
 SEKDA :
 ASISTEN :
 KABAN :
 SEKRETARIS :
 KABID :
 KONSEPTOR :
 PENGETIK :

BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
 SYAMSUDDIN A. HAMID

KODE KEMENDAG	URUSAN	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN					
		VOLUME	SATUAN	HARGA	JUMLAH	VOLUME	SATUAN	HARGA	JUMLAH	SELISIH
- KB JURANA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- KB KOTA SANDIRI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- KB NUR KULIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- KB NUR QALAM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- KB NUR SUCI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- KB AN NUR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- KB HARAPAN BAWASA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- TK PERTANI TAMBORA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Belanja BOP PAUD, KB, dan TK Kec. Mandalle	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- KB AL. PANTIR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- KB AL. PALARI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- KB AL. MAREBAT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- KB AL. QADIRI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- KB MANNAH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- KB MELATI BODIE MANDALLE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- KB AK. BOHMAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- TK PERTANI TAMBORA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Belanja BOP PAUD, KB, dan TK Kec. Lk. Tumbuhbung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- KB AL. MALIK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- KB AL. BAHRI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- KB AL. MOKAWAKASHI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- KB BAHARI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- KB BAHRIUL ULLAH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- KB CAHYA SWANE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- KB BUNDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- KB TERIMBU KANGANG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- TK A. M. NUR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- TK PERTANI LUKANG TUPAREBING	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Belanja BOP PAUD, KB, dan TK Kec. Lk. Tumbuhbung Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- KB A. M. NUR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- KB GEMILANG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- KB KEMANG INDAH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- KB NUSUL ULMI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- KB NURUL AZIZAH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- KB MUKHAMMADI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- KB BAHARI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- SPS PESONA BAHARI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Belanja BOP PAUD, KB, dan TK Kec. Lk. Tangaya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- KB MANNAH KEMANG LEMARI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- KB HARAPAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- KB HARAPAN BAHARI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- KB MANDAMILLAH (GEMANG II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- KB MELATI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- KB TINUS BAHARI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- PAUD BAHARI LUTUNG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- KB BUNGA KEKAYA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- KB ELANGRYAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- KB CITRA BAHARI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- KB CITRA BAHARI SIMANGGA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- KB AL. HUSNANI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- KB MEKAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- KB APRIKA BAJI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- KB APPAKARANNU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Belanja BOP PAUD, KB, dan TK Kec. Lk. Kulmas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

RS
AGIAN KUM

KODE BERSIKING	URUVAN	SEBELUM PERUBAHAN			SEBELAH PERUBAHAN		
		VOLUME	SATUAN	HARGA	VOLUME	SATUAN	HARGA
5.1.7.03.27	Desa Pituwaga Kecamatan Matrang	823.726.000,00			823.726.000,00		
5.1.7.03.28	Desa Pituwaga Kecamatan Matrang	857.578.000,00			857.578.000,00		
5.1.7.03.29	Desa Pituwaga Kecamatan Matrang	814.752.000,00			814.752.000,00		
5.1.7.03.30	Desa Alengkap Kecamatan Matrang	833.003.000,00			833.003.000,00		
5.1.7.03.31	Desa Barang Kecamatan Segeri	887.347.000,00			887.347.000,00		
5.1.7.03.32	Desa Perconteng Kecamatan Segeri	883.221.000,00			883.221.000,00		
5.1.7.03.33	Desa Benteng Kecamatan Mandale	898.904.000,00			898.904.000,00		
5.1.7.03.34	Desa Menggabung Kecamatan Mandale	829.631.000,00			829.631.000,00		
5.1.7.03.35	Desa Tamiraga Kecamatan Mandale	853.030.000,00			853.030.000,00		
5.1.7.03.36	Desa Mandale Kecamatan Mandale	819.882.000,00			819.882.000,00		
5.1.7.03.37	Desa Boddie Kecamatan Mandale	847.792.000,00			847.792.000,00		
5.1.7.03.38	Desa Coppo Tempung Kecamatan Mandale	826.319.000,00			826.319.000,00		
5.1.7.03.39	Desa Matro Bocong Kecamatan Lulang Tupahbiring	933.219.000,00			933.219.000,00		
5.1.7.03.40	Desa Matro Lang Kecamatan Lulang Tupahbiring	933.800.000,00			933.800.000,00		
5.1.7.03.41	Desa Matro Madie Kecamatan Lulang Tupahbiring	897.502.000,00			897.502.000,00		
5.1.7.03.42	Desa Matro Jyung Kecamatan Lulang Tupahbiring	865.128.000,00			865.128.000,00		
5.1.7.03.43	Desa Matro Dohing Kecamatan Lulang	876.273.000,00			876.273.000,00		
5.1.7.03.44	Desa Matro Bone Kecamatan Lulang Tupahbiring	820.834.000,00			820.834.000,00		
5.1.7.03.45	Desa Matro Ader Kecamatan Lulang Tupahbiring	833.429.000,00			833.429.000,00		
5.1.7.03.46	Desa Bala-Balang Kecamatan Lulang Tempaya	871.474.000,00			871.474.000,00		
5.1.7.03.47	Desa Sabana Kecamatan Lulang Tempaya	898.630.000,00			898.630.000,00		
5.1.7.03.48	Desa Sabana Kecamatan Lulang Tempaya	814.819.000,00			814.819.000,00		
5.1.7.03.49	Desa Tampang Kecamatan Lulang Tempaya	838.806.000,00			838.806.000,00		
5.1.7.03.50	Desa Salua Kecamatan Lulang Tempaya	860.411.000,00			860.411.000,00		
5.1.7.03.51	Desa Selateng Kecamatan Lulang Tempaya	817.715.000,00			817.715.000,00		
5.1.7.03.52	Desa Keposong Ball Kecamatan Lulang Tempaya	823.337.000,00			823.337.000,00		
5.1.7.03.53	Desa Potooro Kecamatan Lulang Tempaya	824.900.000,00			824.900.000,00		
5.1.7.03.54	Desa Pemasu Kecamatan Lulang Kelmas	860.961.000,00			860.961.000,00		
5.1.7.03.55	Desa Sabana Kecamatan Lulang Kelmas	834.809.000,00			834.809.000,00		
5.1.7.03.56	Desa Kayurang Kecamatan Lulang Kelmas	843.147.000,00			843.147.000,00		
5.1.7.03.57	Desa Dewang-Dowang Lamgo Kecamatan Lulang Kelmas	798.628.000,00			798.628.000,00		
5.1.7.03.58	Desa Marawade Kecamatan Lulang Kelmas	801.526.000,00			801.526.000,00		
5.1.7.03.59	Desa Dewakang Kecamatan Lulang Kelmas	827.072.000,00			827.072.000,00		
5.1.7.03.60	Desa Matro Bahu Kecamatan Lulang Tupahbiring Utara	905.708.000,00			905.708.000,00		
5.1.7.03.61	Desa Matro Ujung Kecamatan Lulang Tupahbiring Utara	902.875.000,00			902.875.000,00		
5.1.7.03.62	Desa Matro Kanya Kecamatan Lulang Tupahbiring Utara	856.036.000,00			856.036.000,00		
5.1.7.03.63	Desa Matro Bonbang Kecamatan Lulang Tupahbiring Utara	872.042.000,00			872.042.000,00		
5.1.7.03.64	Desa Matro Wale Kecamatan Lulang Tupahbiring Utara	841.994.000,00			841.994.000,00		
5.1.7.03.65	Desa Matro Baji Kecamatan Lulang Tupahbiring Utara	855.829.000,00			855.829.000,00		
5.1.7.03.66	Desa Matro Labang Kecamatan Lulang Tupahbiring Utara	824.820.000,00			824.820.000,00		
5.1.7.04	Badajaj Bantua Kecamatan Kepah Desa Dari Kelopoten/Kota	73.382.464.100,00			73.382.464.100,00		
5.1.7.04.02	Desa Kabha Kecamatan Minastere	1.147.507.000,00			1.147.507.000,00		
5.1.7.04.03	Desa Panakeng Kecamatan Minastere	1.136.270.000,00			1.136.270.000,00		
5.1.7.04.04	Desa Tompa Bahu Kecamatan Balocce	1.167.902.000,00			1.167.902.000,00		
5.1.7.04.05	Desa Barunungun Kecamatan Tondong Talissa	1.113.881.000,00			1.113.881.000,00		
5.1.7.04.06	Desa Tondong Kua Kecamatan Tondong Talissa	1.097.514.000,00			1.097.514.000,00		
5.1.7.04.07	Desa Lanar Kecamatan Tondong Talissa	1.090.224.000,00			1.090.224.000,00		
5.1.7.04.08	Desa Bahu Telue Kecamatan Tondong Talissa	1.111.726.000,00			1.111.726.000,00		
5.1.7.04.09	Desa Malua Kecamatan Tondong Talissa	1.030.500.000,00			1.030.500.000,00		
5.1.7.04.10	Desa Bonto Biro Kecamatan Tondong Talissa	1.073.092.000,00			1.073.092.000,00		
5.1.7.04.11	Desa Bawang Canda Kecamatan Bungoro	1.178.064.000,00			1.178.064.000,00		
5.1.7.04.12	Desa Talu-Talu Kecamatan Bungoro	1.175.879.000,00			1.175.879.000,00		
5.1.7.04.13	Desa Mungla Kecamatan Bungoro	1.196.383.000,00			1.196.383.000,00		
5.1.7.04.14	Desa Bahu Canda Kecamatan Bungoro	1.201.369.000,00			1.201.369.000,00		
5.1.7.04.15	Desa Biring Ete Kecamatan Bungoro	1.109.680.000,00			1.109.680.000,00		



KODE RESKINSUNG	URUMAN	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN		
		VOLUME	SATUAN	HARGA	JUMLAH	VOLUME	SATUAN
5.1.7.04.16	Desa Panuhasing Kecamatan Labakkang			1.110.196.000,00			
5.1.7.04.17	Desa Manduku Kecamatan Labakkang			1.117.457.000,00			
5.1.7.04.18	Desa Oering Kecamatan Labakkang			1.101.552.000,00			
5.1.7.04.19	Desa Batura Kecamatan Labakkang			1.267.125.000,00			
5.1.7.04.20	Desa Yarewang Kecamatan Labakkang			1.243.284.000,00			
5.1.7.04.21	Desa Kanaungga Kecamatan Labakkang			1.181.617.000,00			
5.1.7.04.22	Desa Bontomanga Kecamatan Labakkang			1.159.974.000,00			
5.1.7.04.23	Desa Kasale Kecamatan Labakkang			1.114.198.100,00			
5.1.7.04.24	Desa Batu Batu Kecamatan Labakkang			1.254.337.000,00			
5.1.7.04.25	Desa Padang Lampe Kecamatan Marang			1.141.112.000,00			
5.1.7.04.26	Desa Timanngga Kecamatan Marang			1.154.340.000,00			
5.1.7.04.27	Desa Pituangga Kecamatan Marang			1.070.849.000,00			
5.1.7.04.28	Desa Pite Kecamatan Marang			1.125.541.000,00			
5.1.7.04.29	Desa Pannang Kecamatan Marang			1.056.096.000,00			
5.1.7.04.30	Desa Abangga Kecamatan Marang			1.084.070.000,00			
5.1.7.04.31	Desa Biring Kecamatan Segi			1.173.812.000,00			
5.1.7.04.32	Desa Pererang Kecamatan Segi			1.167.122.000,00			
5.1.7.04.33	Desa Berling Kecamatan Mandalle			1.192.533.000,00			
5.1.7.04.34	Desa Manggubung Kecamatan Mandalle			1.060.223.000,00			
5.1.7.04.35	Desa Timanngga Kecamatan Mandalle			1.118.166.000,00			
5.1.7.04.36	Desa Mandalle Kecamatan Mandalle			1.064.415.000,00			
5.1.7.04.37	Desa Bedde Kecamatan Mandalle			1.109.672.000,00			
5.1.7.04.38	Desa Cippo Tompong Kecamatan Mandalle			1.074.832.000,00			
5.1.7.04.39	Desa Mottro Decong Kecamatan Labakkang Tupahbiring			1.251.440.000,00			
5.1.7.04.40	Desa Mottro Lang Kecamatan Labakkang Tupahbiring			1.249.138.000,00			
5.1.7.04.41	Desa Mottro Mase Kecamatan Labakkang Tupahbiring			1.190.279.000,00			
5.1.7.04.42	Desa Mottro Ujung Kecamatan Labakkang Tupahbiring			1.137.784.000,00			
5.1.7.04.43	Desa Mottro Dabang Kecamatan Labakkang Tupahbiring			1.155.858.000,00			
5.1.7.04.44	Desa Mottro Bore Kecamatan Labakkang Tupahbiring			1.065.959.000,00			
5.1.7.04.45	Desa Mottro Mase Kecamatan Labakkang Tupahbiring			1.086.381.000,00			
5.1.7.04.46	Desa Balo-Balung Kecamatan Labakkang Tupahbiring			1.148.073.000,00			
5.1.7.04.47	Desa Sibulana Kecamatan Labakkang Tupahbiring			1.192.108.000,00			
5.1.7.04.48	Desa Siburu Kecamatan Labakkang Tupahbiring			1.056.205.000,00			
5.1.7.04.49	Desa Timuang Kecamatan Labakkang Tupahbiring			1.095.101.000,00			
5.1.7.04.50	Desa Sibula Kecamatan Labakkang Tupahbiring			1.130.134.000,00			
5.1.7.04.51	Desa Satanger Kecamatan Labakkang Tupahbiring			1.060.902.000,00			
5.1.7.04.52	Desa Koppesang Bali Kecamatan Labakkang Tupahbiring			1.073.260.000,00			
5.1.7.04.53	Desa Polokora Kecamatan Labakkang Tupahbiring			1.072.551.000,00			
5.1.7.04.54	Desa Pannasa Kecamatan Labakkang Kalmas			1.131.027.000,00			
5.1.7.04.55	Desa Siburu Kecamatan Labakkang Kalmas			1.088.620.000,00			
5.1.7.04.56	Desa Kuyung Kecamatan Labakkang Kalmas			1.102.140.000,00			
5.1.7.04.57	Desa Deang Deangan Lampo Kecamatan Labakkang Kalmas			1.029.950.000,00			
5.1.7.04.58	Desa Marasende Kecamatan Labakkang Kalmas			1.034.650.000,00			
5.1.7.04.59	Desa Dewaling Kecamatan Labakkang Kalmas			1.077.554.000,00			
5.1.7.04.60	Desa Mottro Bala Kecamatan Labakkang Tupahbiring Uraa			1.203.587.000,00			
5.1.7.04.61	Desa Mottro Ureng Kecamatan Labakkang Tupahbiring Uraa			1.198.993.000,00			
5.1.7.04.62	Desa Mottro Kania Kecamatan Labakkang Tupahbiring Uraa			1.123.040.000,00			
5.1.7.04.63	Desa Mottro Banih Kecamatan Labakkang Tupahbiring Uraa			1.148.994.000,00			
5.1.7.04.64	Desa Mottro Wale Kecamatan Labakkang Tupahbiring Uraa			1.100.270.000,00			
5.1.7.04.65	Desa Mottro Baji Kecamatan Labakkang Tupahbiring Uraa			1.122.704.000,00			
5.1.7.04.66	Desa Mottro Labuang Kecamatan Labakkang Tupahbiring Uraa			1.072.438.000,00			
5.1.7.05	Belanja Bantuan Kepada Peralai Politik			788.391.000,00			
5.1.7.05.02	Peralai Hidi Nuran Rakyat			31.900.500,00			
5.1.7.05.06	Peralai Cerdani Indonesia Raya			67.959.000,00			
5.1.7.05.09	Peralai Cerdani Sphlhtara			42.178.500,00			

KODE REKENING	URAIAN	SETELAH PERUBAHAN			SEBELUM PERUBAHAN				
		VOLUME	SAKUN	HARGA	JUMLAH	VOLUME	SAKUN	HARGA	JUMLAH
5.1.7.05.10	Perai Annuit Nasional				58.234.500,00			58.234.500,00	-
5.1.7.05.14	Perai Kelangkaan Bunga				91.426.500,00			91.426.500,00	-
5.1.7.05.24	Perai Kelangkaan Karya				229.725.000,00			229.725.000,00	-
5.1.7.05.25	Perai Prasmanan Pembangunan				106.373.500,00			106.373.500,00	-
5.1.7.05.29	Perai Dendang Indonesia Perunggan				33.565.500,00			33.565.500,00	-
5.1.7.05.32	Perai Dendang				83.214.000,00			83.214.000,00	-
5.1.7.05.40	Perai Nasional Dendang				43.812.000,00			43.812.000,00	-
5.1.8	Belanja Tidak Terduga				631.166.000,00			631.166.000,00	-
5.1.8.01	Belanja Tak Terduga				631.166.000,00			631.166.000,00	-
5.1.8.01.01	Belanja Tidak Terduga				631.166.000,00			631.166.000,00	-
	- Belanja tidak terduga				631.166.000,00			631.166.000,00	-
	- Belanja tidak terduga	1	halus	631.166.000,00				631.166.000,00	-

Dibuat oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Panggajene Dan Kepulauan

Catatan	
1. Usulan Surat	: Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
2. Sumber Dana	: Silpa
3. Bentuk Pergerakan	: -
4. Tingkat Persejuaan	: Penyempurnaan ke DPRD
5. Catatan Lainnya	:



PARAF :
 SEKDA :
 ASISTEN :
 KABAN :
 SEKRETARIS :
 KABID :
 KONSEPTOR :
 PENGETIK :

BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,
 SYAMSUDDIN A. HAID

ARSIP
 BAGIAN HUKUM

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN			SEBELAH PERUBAHAN			
		VOLUME	SATUAN	HARGA	JUMLAH	VOLUME	SATUAN	HARGA
5. 2. 2. 02	- Bedrockin	-	-	-	-	-	-	-
	- Kapsas	-	-	-	-	-	-	-
	- Onalit	-	-	-	-	-	-	-
	- Bedanja Bahan/Material	-	-	-	-	-	-	-
	- Bedanja Bahan Baku Bangunan	-	-	-	-	-	-	-
	- Bedanja Bahan Baku Bangunan (TK Negeri Pembina Bangorol)	-	-	-	-	-	-	-
	- Seng Lcsm	-	-	-	-	-	-	-
	- Paku Besar + Paku Kecil	-	-	-	-	-	-	-
	- Bakok	-	-	-	-	-	-	-
	- Pipan	-	-	-	-	-	-	-
	- Cat Arisan	-	-	-	-	-	-	-
	- Biaya Umum (TK Negeri Pembina Bangorol)	-	-	-	-	-	-	-
	- Ongkos Tumbang	-	-	-	-	-	-	-
	- Bedanja bahan pelahan/praktek/produksi	-	-	-	-	-	-	-
	- APE Luar TK Negeri Pembina Bangorol	-	-	-	-	-	-	-
5. 2. 2. 02 . 12	- Aytan	-	-	-	-	-	-	-
	- Bola Besar, Sedang, Kecil	-	-	-	-	-	-	-
	- APE Dalam TK Negeri Pembina Bangorol	-	-	-	-	-	-	-
	- Pagarangan Guru A	-	-	-	-	-	-	-
	- Pagarangan Guru B	-	-	-	-	-	-	-
	- Paredi Prokesi	-	-	-	-	-	-	-
	- Prokesi Keluaraga	-	-	-	-	-	-	-
	- Pused Arab	-	-	-	-	-	-	-
	- Pused Basca	-	-	-	-	-	-	-
	- Pused Herwan	-	-	-	-	-	-	-
	- Benda Isi	-	-	-	-	-	-	-
	- Balok Roda	-	-	-	-	-	-	-
	- Balok Irtan	-	-	-	-	-	-	-
	- Balok Angka	-	-	-	-	-	-	-
	- Menango Sepilpa	-	-	-	-	-	-	-
- Menara Limgkar	-	-	-	-	-	-	-	
- Menara Kubus	-	-	-	-	-	-	-	
- Menara Stindir	-	-	-	-	-	-	-	
- Kartu Amabul Hutan	-	-	-	-	-	-	-	
- Kartu Hurur Angka Hitung	-	-	-	-	-	-	-	
- Kartu Doa Anak Muslim	-	-	-	-	-	-	-	
- Pused Alus Dunia	-	-	-	-	-	-	-	
- Mengenal Provinsi di Indonesia	-	-	-	-	-	-	-	
- Kuda Kedapan Putih	-	-	-	-	-	-	-	
- Kuda Kedapan Merah	-	-	-	-	-	-	-	
- APE Luar TK Negeri Pembina Bangorol	-	-	-	-	-	-	-	
- Perodan	-	-	-	-	-	-	-	
- Bola Besar, Sedang, Kecil	-	-	-	-	-	-	-	
- Ban Mobil	-	-	-	-	-	-	-	
- APE Dalam TK Negeri Pembina Bangorol	-	-	-	-	-	-	-	
- Alat Bernam Samali Bedjar (Pagarangan Guru Seri A dan Seri B)	-	-	-	-	-	-	-	
- Bantal Percocek	-	-	-	-	-	-	-	
- Percocek	-	-	-	-	-	-	-	
- Ancas Rupa Alat Bernam dari Kayu	-	-	-	-	-	-	-	
- Bedanja Jasa kamtor	-	-	-	-	-	-	-	
- Bedanja Air	-	-	-	-	-	-	-	

APRSIP
SASISIH

KODE REKENING	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA	JUMLAH	VOLUME	SATUAN	HARGA
5. 2. 2. 03	Bedanja Jasa kamtor	-	-	-	-	-	-	-
5. 2. 2. 03 . 02	Bedanja Air	-	-	-	-	-	-	-

KODE REKENING	URBAN	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			
		VOLUME	SATUAN	HARGA	JUMLAH	VOLUME	SATUAN	SELISIH
	- Karpet	-	-	-	-	-	-	-
	- Jan Dinding	-	-	-	-	-	-	-
5.2.3.28	- Bingkai dan Foto Bupat dan Wakil Bupat	-	-	-	-	-	-	-
5.2.3.28.04	- Bedanya Model Perlatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	-	-	-	-	-	-	-
	- Bedanya Model Perlatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendidikan	-	-	-	-	-	-	-
	- Pengadaan Alat Pendidikan TK Negeri Pembina Pangkalene	-	-	-	-	-	-	-
5.2.3.29	- Kipas Angin	-	-	-	-	-	-	-
5.2.3.29.04	- Bedanya Model Perlatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	-	-	-	-	-	-	-
	- Bedanya Model Perlatan dan Mesin - Pengadaan Perlatan Kiri komputer	-	-	-	-	-	-	-
	- Pengadaan Perlatan Komputer TK Negeri Pembina Pangkalene	-	-	-	-	-	-	-
	- Printer Foto Copy	-	-	-	-	-	-	-
	- Pengadaan Perlatan Komputer TK Negeri Pembina Bangoroi	-	-	-	-	-	-	-
5.2.3.31	- Printer	-	-	-	-	-	-	-
5.2.3.31.01	- Bedanya Model Perlatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	-	-	-	-	-	-	-
	- Bedanya Model Perlatan dan Mesin - Pengadaan Perlatan Studio Visual	-	-	-	-	-	-	-
	- Pengadaan Perlatan Studio Visual TK Negeri Pembina Pangkalene	-	-	-	-	-	-	-
	- Mikropone	-	-	-	-	-	-	-
	- Pengadaan Perlatan Studio Visual TK Negeri Pembina Bangoroi	-	-	-	-	-	-	-
	- MIC	-	-	-	-	-	-	-

Diseriut Oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Pangkalene Dan Kepulauan

- Catatan
1. Usulan Surat : Pendidikan
 2. Sumber Dana : Silpa
 3. Bentuk Pengeseran : -
 4. Tingkat Pencapaian : Penyempitan ke DPRD
 5. Catatan Lainnya : Uang Penda

TELAH DITELITI OLEH
BAHAG HUKUM DAN PERENCANAAN
PENGALAMAN
IRDAS, SH, M.Si
NIP. 19660320 199303 1 0118

BUPATI PANGKALENE KEPULAUAN,

PARAF : 
SEKDA : 
ASISTEN : 
KABAN : 
SEKRETARIS : 
KABID : 
KONSEPTOR : 
PENGETIK : 

SYAMSUDDIN A HAMID

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PANGKALJENE DAN KEPULAUAN
NO. 101 TAHUN 2016 TENTANG PENGANTARAN BAHAN BAKU DAN KELOMPOK
NO. 101 TAHUN 2016 TENTANG PENGANTARAN BAHAN BAKU DAN KELOMPOK
DAN BELAJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017

A R S I P
BAGIAN HUKUM

Urusan Pemerintahan : 3
 Bidang Pemerintahan : 3.03
 Unit Organisasi : 3.03.01
 Sub Unit Organisasi : 3.03.01.01

Urusan Pilihan
 Perikanan
 Dinas Perikanan
 Dinas Perikanan

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN					
		VOLUME	SATUAN	HARGA	JUMLAH	VOLUME	SATUAN	HARGA	JUMLAH	SISILAH
5	BELAJA									
5.1	BELAJA TIDAK LANGSUNG									
5.1.1	Belanja Pegawai									
5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan									
5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi									
5.1.1.01.02	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi									
5.1.1.01.03	Tunjangan Keluarga									
5.1.1.01.04	Tunjangan Jabatan									
5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional									
5.1.1.01.06	Tunjangan Fungsional									
5.1.1.01.07	Tunjangan Fungsional									
5.1.1.01.08	Tunjangan Fungsional									
5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS									
5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Besok Kerja									
5.1.1.06	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah									
5.1.1.06.22	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Rumah Pungut Hewan									



PARAF
 SEKDA : *[Signature]*
 ASISTEN : *[Signature]*
 KABAN : *[Signature]*
 SEKRETARIS : *[Signature]*
 KABID : *[Signature]*
 KONSEPTOR : *[Signature]*
 PENGETIK : *[Signature]*

BUPATI PANGKALJENE DAN KEPULAUAN,
 SYAMSUDDIN A. HAMID

Catatan :
 1. Usulan Surat : Dinas Perikanan
 2. Salinan Data :
 3. Bentuk Kerjasama :
 4. Tingkat Persetujuan : Penerimaan ke DPRD
 5. Catatan Lainnya :

Disetujui Oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan

LAMPIRAN : PESERTUAN RUPAT PANGKALENE DAN KEPULAUAN
 KOMOR : TAHUN 2017
 TENTANG : PERUBAHAN KEENAM PERATURAN RUPAT PANGKALENE DAN KEPULAUAN
 NOMOR 101 TAHUN 2016 TENTANG PERAKSIAN ANGGARAN PENDAPATAN
 DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017

ARSIP
BAGIAN HUKUM

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN			SEBELAH PERUBAHAN			SELISIH
		VOLUME	SATUAN	HARGA	JUMLAH	VOLUME	SATUAN	
21	Program pengembangan perikanan tangkap							
21.06	Pembangunan Sarana dan Peralatan Perikanan Tangkap							
5	BELANJA	2.673.070,00,00		2.768.050,000,00				-
5.2	BELANJA LANGSUNG	2.673.070,000,00		2.768.050,000,00				-
5.2.1	Belanja Pegawai	3.550,000,00		5.650,000,00				-
5.2.1.01	Honorarium PNS	3.550,000,00		5.650,000,00				-
5.2.1.01.01	Honorarium Berita Pembekuan Kegiatan	3.550,000,00		5.650,000,00				-
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.269.520,000,00		2.362.400,000,00				-
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	18.000,000,00		18.000,000,00				-
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.250,000,00		1.250,000,00				-
5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1.250,000,00		1.250,000,00				-
5.2.2.02.08	Belanja dokumentasi	1.000,000,00		1.000,000,00				-
5.2.2.02.09	Belanja spanduk	250,000,00		250,000,00				-
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.020,000,00		14.900,000,00				-
5.2.2.03.28	Belanja jasa Tenaga Abi/Instruktur/Narasumber	1.900,000,00		8.900,000,00				-
5.2.2.03.33	Belanja Cetak dan Pengandaian	120,000,00		6.000,000,00				-
5.2.2.06	Belanja Pengandaian	1.000,000,00		1.000,000,00				-
5.2.2.06.02	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.000,000,00		1.000,000,00				-
5.2.2.07	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	1.000,000,00		1.000,000,00				-
5.2.2.07.02	Belanja Makanan dan Minuman	8.750,000,00		8.750,000,00				-
5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman peserta	8.750,000,00		8.750,000,00				-
5.2.2.11.05	Belanja Jasa Konsultansi	130.800,000,00		130.800,000,00				-
5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	130.800,000,00		130.800,000,00				-
5.2.2.21.01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	2.106.700,000,00		2.186.700,000,00				-
5.2.2.23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	2.106.700,000,00		2.186.700,000,00				-
5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	2.106.700,000,00		2.186.700,000,00				-
5.2.3	Belanja Modal	400.000,000,00		400.000,000,00				-
5.2.3.25	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pengandaian	400.000,000,00		400.000,000,00				-
5.2.3.25.08	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pengandaian Produkasi Perikanan	400.000,000,00		400.000,000,00				-
5.2.3.49	Pengadaan rumah ikan	400.000,000,00	1	400.000,000,00				(400.000,000,00)
5.2.3.49.18	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Kandang Hewan/Ternak	400.000,000,00	1	400.000,000,00				(400.000,000,00)
22	Program pengembangan sistem penyuluhan perikanan							
22.05	Pembinaan Kemandirian dan Kelompok							
5	BELANJA	50.000,000,00		50.000,000,00				-
5.2	BELANJA LANGSUNG	50.000,000,00		50.000,000,00				-
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	50.000,000,00		50.000,000,00				-
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	21.700,000,00		21.700,000,00				-
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	21.700,000,00		21.700,000,00				-
5.2.2.01.01	Belanja personal use	18.200,000,00		18.200,000,00				-
5.2.2.01.01	Belanja papan nama kelompok	11.900,000,00	1	11.900,000,00				(11.900,000,00)



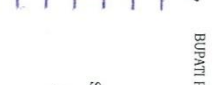


KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN					
		VOLUME	SATUAN	HARGA	JUMLAH	VOLUME	SATUAN	HARGA	JUMLAH	SELISIH
	Belanja-Jasa Pendamping Usang Pabrik ke Tjigel - Penyusunan UKL / UPL, Kumpul Pangek Hewan									
		1	Paket	48.950.000,00	48.950.000,00			48.950.000,00	48.950.000,00	
				48.950.000,00				48.950.000,00	48.950.000,00	


Disetujui Oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Pangkalene Dan Kepulauan

ARSIP
BAGIAN HUKUM

- Catatan
- 1. Uraian Surat : Dinas Kerajinan
 - 2. Sumber Dana : -
 - 3. Bentuk Keperluan : -
 - 4. Tingkat Keperluan : Pengumpulan ke DPRD
 - 5. Catatan Lainnya : -



PARAF :  IRDAS, ST, M.Si
 SEKRETARIS :  IRDAS, ST, M.Si
 KABID :  IRDAS, ST, M.Si
 KONSEPTOR :  IRDAS, ST, M.Si
 PENGETIK :  IRDAS, ST, M.Si

BUPATI PANGKALENE DAN KEPULAUAN,

 SYAMSUDDIN A. HAMID

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
 NOMOR : TAHUN 2017
 TENTANG : PERUBAHAN KEEMAS PERHITUNGAN BEPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
 NOMOR 101 TAHUN 2016 TENTANG PENJABATAN ANGGARAN PEMBAHATAN
 DAN BELANJA DEBERAH TAHUN ANGGARAN 2017

ARSIP
BAGIAN HUKUM

Usulan Penelitian : 4
 Bidang Penelitian : 4.07
 Unit Organisasi : 4.07.4.07.10
 Sub Unit Organisasi : 4.07.4.07.10.01

Usulan Penelitian Turun Penjurug
 Penelitian dan Pengembangan
 Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
 Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		SELISIH			
		VOLUME	SATUAN	HARGA	JUMLAH		VOLUME	SATUAN	HARGA
5	BELANJA								
5.2	BELANJA LANGSUNG	26.132.200,00	50.000.000,00	28.632.200,00	50.000.000,00	-			
5.2.1	Belanja Pegawai	26.132.200,00	50.000.000,00	28.632.200,00	50.000.000,00	-			
5.2.1.01	Honorarium PNS	3.900.000,00	20.200.000,00	3.900.000,00	20.200.000,00	-			
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.900.000,00	20.200.000,00	3.900.000,00	20.200.000,00	-			
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	22.232.200,00	29.800.000,00	24.732.200,00	29.800.000,00	-			
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.842.000,00	2.215.000,00	1.842.000,00	2.215.000,00	-			
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.842.000,00	2.215.000,00	1.842.000,00	2.215.000,00	-			
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	300.000,00	1.200.000,00	5.300.000,00	6.200.000,00	5.000.000,00			5.000.000,00
5.2.2.03.24	Belanja jasa pendampingan penelitian	-	-	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00			5.000.000,00
5.2.2.03.29	- jasa pendampingan penelitian	-	-	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00			5.000.000,00
5.2.2.06	Belanja Jasa/Upah Tenaga Harian Lepas (THL)	300.000,00	1.200.000,00	300.000,00	1.200.000,00	-			
5.2.2.06.02	Belanja Cetak dan Penggandaan	200,00	1.085.000,00	200,00	1.085.000,00	-			
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	200,00	1.085.000,00	200,00	1.085.000,00	-			
5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	90.000,00	2.800.000,00	90.000,00	2.800.000,00	-			
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	17.500.000,00	17.500.000,00	17.500.000,00	17.500.000,00	-			
5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	-			
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	-			
5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	2.500.000,00	5.000.000,00	-	-	(5.000.000,00)			(5.000.000,00)
5.2.2.21.01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	2.500.000,00	5.000.000,00	-	-	(5.000.000,00)			(5.000.000,00)
	- Jasa Konsultansi	2.500.000,00	5.000.000,00	-	-	(5.000.000,00)			(5.000.000,00)
	- Jasa Konsultansi	2.500.000,00	5.000.000,00	-	-	(5.000.000,00)			(5.000.000,00)

Diseriuti Oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Pangajene Dan Kepulauan

- Catatan
1. Usulan Surat : Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
 2. Sumber Dana : -
 3. Bentuk Pengeseran : -
 4. Tingkat Pengeseran : Penyempurnaan ke DPRD
 5. Catatan Lainnya : -

TELAN NGOTOLO
 BAKAM HUKUM DAN PENJABATAN ANGGARAN
 PENGESERAN

IRDAS. S. W. M. S. I.
 NIP. 19660920 198303 1011

PARAF

SEKDA :
 ASISTEN :
 KABAN :
 SEKRETARIS :
 KABID :
 KONSEPTOR :
 PENGETIK :

BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,
 STANSUDIN A. HAMID